

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan naturalisasi pemain sepak bola yang dilakukan oleh PSSI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai strategi teknis untuk meningkatkan performa tim nasional, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika identitas, konstruksi persepsi, serta relasi kuasa dalam konteks pascakolonial. Berdasarkan perspektif teori poskolonial, khususnya konsep *inferiority complex* yang dikemukakan oleh Frantz Fanon serta konsep *mimicry* dari Homi K. Bhabha, kebijakan naturalisasi mencerminkan adanya kecenderungan aktor olahraga nasional untuk menjadikan standar sepak bola Barat sebagai tolok ukur utama dalam menilai kualitas, profesionalisme, serta kesiapan kompetitif pemain. Fenomena ini terlihat dari preferensi terhadap pemain diaspora yang dibesarkan dan berkembang dalam sistem sepak bola Eropa, khususnya dari negara seperti Belanda, yang secara historis memiliki keterkaitan dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Pemain diaspora tersebut sering diasosiasikan dengan kualitas teknis yang lebih baik, tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, serta profesionalisme yang dianggap lebih matang dibandingkan dengan pemain lokal. Orientasi terhadap sistem eksternal ini tidak hanya mencerminkan pertimbangan pragmatis, tetapi juga menunjukkan adanya

konstruksi persepsi yang menempatkan pengalaman dan lingkungan sepak bola Barat sebagai sumber legitimasi kualitas tim nasional Indonesia.

Dalam konteks ini, kebijakan naturalisasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi peningkatan performa dalam jangka pendek, tetapi juga merefleksikan internalisasi persepsi bahwa sistem sepak bola luar lebih unggul dibandingkan dengan sistem domestik. Lebih lanjut, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk *mimicry*, yaitu kecenderungan untuk meniru atau mereplikasi model keberhasilan dari sistem yang dianggap lebih maju. Namun demikian, peniruan tersebut tidak menghasilkan kesamaan yang sepenuhnya, melainkan menciptakan kondisi ambivalen yang menunjukkan bahwa sistem domestik berupaya mendekati standar eksternal tanpa benar-benar mampu mereproduksinya secara utuh. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan naturalisasi sering kali diposisikan sebagai solusi instan untuk menjawab tekanan publik terhadap peningkatan prestasi tim nasional di level internasional. Dalam situasi di mana ekspektasi terhadap keberhasilan tim nasional semakin tinggi, naturalisasi menjadi strategi yang dianggap mampu memberikan dampak cepat terhadap kualitas permainan. Meskipun demikian, ketergantungan yang berlebihan terhadap pemain naturalisasi berpotensi menghambat pembangunan sistem pembinaan pemain lokal yang berkelanjutan serta memperkuat ketergantungan terhadap sumber daya eksternal.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada melemahnya upaya pembangunan fondasi sepak bola nasional secara mandiri, terutama jika

kebijakan naturalisasi tidak diimbangi dengan penguatan sistem pembinaan domestik. Oleh karena itu, strategi naturalisasi dalam konteks sepak bola Indonesia dapat dipahami sebagai refleksi dari dua dimensi sekaligus, yaitu sebagai strategi pragmatis untuk meningkatkan daya saing tim nasional dan sebagai manifestasi dari dinamika psikologis serta historis yang dipengaruhi oleh warisan kolonial. Dengan demikian, melalui perspektif hubungan internasional, khususnya pendekatan pascakolonial, kebijakan naturalisasi dapat dianalisis secara lebih kritis sebagai bagian dari konstruksi identitas nasional, proses internalisasi standar global, serta relasi kuasa dalam sistem olahraga internasional.

4.2. Saran Penelitian

Penelitian ini telah memberikan jawaban atas rumusan masalah terkait bagaimana kebijakan naturalisasi pemain sepak bola oleh stakeholder PSSI dapat dipahami melalui perspektif *inferiority complex* dalam konteks pascakolonial. Analisis yang menggunakan pendekatan teori poskolonial menunjukkan bahwa kebijakan naturalisasi tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis untuk meningkatkan performa tim nasional, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi persepsi yang menempatkan sistem sepak bola Barat sebagai standar utama dalam menentukan kualitas dan profesionalisme pemain. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika historis, identitas nasional, serta orientasi terhadap sistem sepak bola global yang lebih luas. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian-penelitian selanjutnya

untuk mengembangkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih rinci dampak jangka panjang kebijakan naturalisasi terhadap perkembangan sistem pembinaan pemain lokal di Indonesia, khususnya dalam melihat bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi investasi, prioritas, serta arah pengembangan talenta domestik dalam jangka panjang.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan analisis dengan menelaah peran persepsi publik, media, serta aktor-aktor dalam institusi sepak bola dalam membentuk legitimasi terhadap kebijakan naturalisasi. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana wacana mengenai kualitas, profesionalisme, serta standar global dikonstruksikan dan direproduksi dalam konteks sepak bola nasional, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika sosial yang memengaruhi kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, penelitian di masa mendatang juga disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan kebijakan naturalisasi yang diterapkan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kebijakan serupa dalam dunia sepak bola internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai variasi strategi, konteks politik, serta implikasi kebijakan naturalisasi dalam sistem olahraga global, sekaligus memperkaya kajian hubungan internasional dalam bidang olahraga. Di sisi praktis, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya bagi PSSI untuk menyeimbangkan antara kebijakan

naturalisasi sebagai strategi jangka pendek dengan penguatan sistem pembinaan pemain lokal sebagai strategi jangka panjang. Keseimbangan ini diperlukan agar pembangunan sepak bola nasional tidak hanya berorientasi pada hasil instan, tetapi juga pada keberlanjutan, kemandirian, serta penguatan kapasitas domestik dalam menghasilkan pemain berkualitas.

Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara kebijakan olahraga, dinamika identitas nasional, serta struktur kekuasaan dalam konteks global, khususnya dalam kerangka studi hubungan internasional. Selain itu, kajian lanjutan juga diharapkan dapat memperdalam analisis mengenai bagaimana praktik-praktik dalam dunia olahraga dapat merefleksikan dinamika yang lebih luas dalam hubungan internasional, termasuk dalam hal konstruksi identitas, legitimasi, serta distribusi kekuasaan di tingkat global.